

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPA Buluh Kabupaten Bangkalan, adapun kesimpulan dari penelitian ini, yakni:

1. Efektivitas, Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Buluh Kabupaten Bangkalan sudah dilakukan seefektifnya dimana hal tersebut tercermin dalam pengurangan volume sampah, pengelolaan gas methana yang efisien, peningkatan kebersihan dan ketertiban di area TPA, serta pemenuhan regulasi lingkungan yang berlaku.

2. Efisiensi

Dengan menerapkan praktik pengelolaan sampah yang efisien di TPA Buluh Kabupaten Bangkalan, penggunaan sumber daya yang optimal, pengurangan limbah yang terbuang, peningkatan efisiensi operasional, dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan memberikan manfaat baik bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar

3. Kecukupan

Pemecahan masalah dan pencapaian hasil yang diinginkan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan menjadi tolok ukur kecukupan. Dalam hal ini, keberhasilan dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang ditetapkan, seperti pengurangan volume sampah, peningkatan daur ulang, atau peningkatan

kebersihan lingkungan, menunjukkan kecukupan dari pemecahan masalah yang diinginkan.

4. Pemerataan, pemerataan dalam konteks pengelolaan sampah di Bangkalan merujuk pada hanya pada 4 kecamatan yang di layani oleh TPA Buluh Kabupaten Bangkalan ini berarti bahwa pemerataan layanan akan pengelolaan sampah kurang proporsional adil dan merata mengingat daerah Kabupaten Bangkalan juga cukup luas.

5. Responsivitas

Bahwa kebijakan tentang pengelolaan sampah yang diambil memberikan respons yang efektif dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini, responsivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan memperhatikan variasi dan perbedaan dalam kelompok-kelompok masyarakat. Setiap kelompok masyarakat memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda dalam hal pengelolaan sampah, tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis, tingkat pendapatan, aksesibilitas, dan kebutuhan khusus.

6. Ketepatan

Dalam konteks evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan merujuk pada sejauh mana hasil evaluasi tersebut memberikan manfaat, dimana ketepatan tersebut hanya mencakup 4 kecamatan di bangkalan yang terlayani dalam pengelolaan sampah.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dijabarkan peneliti, maka saran dan masukan dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Pengolahan sampah dengan metode open dumping di Kabupaten Bangkalan saat ini tidak lagi sesuai dengan keadaan, terutama karena jumlah sampah yang terus meningkat. Metode open dumping dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, baik secara fisik maupun nonfisik. Dalam konteks peningkatan jumlah timbulan sampah, metode open dumping dapat menyebabkan penumpukan sampah yang tidak terkendali. Hal ini dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan udara, serta mengundang masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, bau tidak sedap, penyebaran hama, dan kerusakan estetika lingkungan juga merupakan dampak negatif yang sering terjadi akibat penggunaan metode open dumping. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan dalam sistem pengolahan sampah di Kabupaten Bangkalan. Penggunaan metode open dumping perlu digantikan dengan metode yang lebih modern, seperti pengolahan sampah secara terkontrol dan terpadu. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah penggunaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang memenuhi standar teknis dan lingkungan. TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan seperti pemadatan, pengomposan, atau pengolahan energi dari sampah
2. Sebaiknya pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan juga didukung dengan pelimpahan atau transfer sumber daya yang mencakup aspek dana, sarana prasarana, dan ketersediaan aparatur pelaksana di Kabupaten Bangkalan.

Dengan adanya pelimpahan sumber daya ini, kecamatan akan memiliki kemampuan untuk melakukan perencanaan yang baik, termasuk dalam hal sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pelimpahan tersebut. Hal ini akan memungkinkan kecamatan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada di wilayahnya. Dalam hal dana, penting untuk memastikan bahwa kecamatan memiliki anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang dialihkan kepadanya.

3. Setiap kelurahan diharapkan memiliki minimal 3 TPS (Tempat Pembuangan Sampah) untuk dapat mengakomodasi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dengan adanya jumlah TPS yang memadai, diharapkan tumpukan sampah di sepanjang jalan protokol dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Pemerintah setempat perlu melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk dinas lingkungan hidup dan kelurahan, untuk memastikan penempatan, pengelolaan, dan pemeliharaan TPS dilakukan dengan baik. Selain itu, penting juga untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang ditentukan, sehingga kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat meningkat.